

# PROSES INTEGRASI DAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Hasan Warso Syahputra

<sup>1</sup>Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293  
email: bangcacan@gmail.com

## Abstract

*Riau Province Government considered to be foremost in preparation and planning for the implementation of SDGs in Indonesia. However, SDGs is an United Nation policy introduced into Riau Province development planning, the concept of SDGs can be in accordance with the direction of development policies and can also be something foreign, contradictory or even become a burden in its implementation in the regions. This study aims to see how the process of integration and implementation of SDGs in regional development, especially poverty alleviation in Riau Province, also revealed what obstacles were faced by the Riau Province government. This a qualitative descriptive research methods by collecting information in various ways such as direct observation, document review, recording and through direct interviews with selected informants from Regional Services that deal with poverty alleviation in Riau Province. The results showed that there were 17 indicators in Riau Province's RPJMD that were in line with SDGs indicators, and as many as 15 SDGs indicators that could be proxied into RPJMD indicators, while 217 indicators were not in the RPJMD and needed to be developed. In the RAD SDGs of Riau Province in 2017-2019 4 targets and 26 poverty SDGs indicators have been set which are supported by various programs implemented by several relevant services and other non-government parties.*

**Keywords:** *Integration, Planning, Implementation, Poverty*

## 1. Pendahuluan:

Pemerintah Provinsi Riau adalah pemerintah daerah yang dianggap terdepan oleh BAPPENAS RI dalam persiapan dan perencanaan implementasi SDGs, hal ini ditunjukkan salah satunya yaitu sebagai provinsi yang pertama menetapkan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018. Selain itu Pemerintah Provinsi Riau telah beberapakali menerima kunjungan provinsi lainnya dalam rangka studi banding kesiapan dan perencanaan SDGs, seperti pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu pemerintah Provinsi Riau telah mendapat asistensi langsung dari UNDP dalam proses persiapan, perencanaan dan implementasi SDGs hingga akhir 2019.

Sejalan dengan tujuan 1 SDGs yaitu “Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun”, maka Provinsi Riau juga memiliki isu kemiskinan yang perlu dituntaskan. Pengentasan kemiskinan menjadi suatu agenda wajib yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan amanat UUD 1945 pada alinea ke 4. Amanat ini tertuang dalam beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945 antara lain : Pasal 27 ayat 2 “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28 H ayat 1 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan juga Pasal 34 ayat 2 yaitu “negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pengentasan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang

terjadi, untuk mempercepat penanganan kemiskinan maka hal ini perlu dilakukan bersama-sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Adanya intervensi kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, mengingat permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan dasar yang perlu segera diselesaikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya konsep SDGs diharapkan dapat memberikan warna dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi Riau. SDGs menggunakan pendekatan Multidimension Poverty Approach (MPA) dalam memandang kemiskinan di Provinsi Riau.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 mengamanatkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengintegrasikan SDGs kedalam Perencanaan pembangunan dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang juga selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs. Namun SDGs merupakan kebijakan asing yang diintroduksi kedalam perencanaan pembangunan Indonesia termasuk kedalam dokumen perencanaan provinsi Riau, agenda SDGs bisa saja sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan bisa pula menjadi sesuatu yang asing, bertentangan atau bahkan menjadi beban tersendiri dalam implementasinya di daerah. Di sisi lain pemerintah Provinsi Riau telah memiliki konsep arah kebijakan pembangunannya sendiri yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau yang biasa disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehubungan dengan hal tersebut maka perumusan masalah yang coba dibangun dalam dalam jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana proses integrasi dan implementasi SDGs dalam pembangunan daerah khususnya pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses integrasi dan implementasi SDGs tersebut?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Beberapa pendapat ahli seperti Sen (1997); Alkire (2015) menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan justru bersifat multidimensional. Artinya

banyak faktor diluar kemampuan untuk konsumsi yang mampu membuat seseorang menjadi miskin. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulangnya.

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Secara umum akibat yang akan timbul dalam permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup (Mutaqien, 2006)

SDGs menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan, untuk itu dari 17 tujuan SDGs maka tujuan Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun menjadi tujuan yang pertama dalam pencapaian SDGs. SDGs melihat kemiskinan dengan sudut pandang kemiskinan multidimensi atau yang biasa kita kenal Multidimension Poverty Approach (MPA). Pendekatan Kemiskinan multidimensi adalah pendekatan yang memandang kemiskinan yang dilihat dari beberapa dimensi seperti kondisi kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, standar hidup yang tidak memadai, kurangnya pendapatan, ketidakberdayaan, kualitas kerja yang buruk dan ancaman dari kekerasan. Pendekatan

multidimensional dapat menggabungkan berbagai indikator untuk menangkap kompleksitas kemiskinan, dengan demikian maka kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dikeluarkan dengan lebih baik.

Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi Millenium Development Goals (MDGs) untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif, sehingga keterlibatan pihak-pihak atau yang lebih dikenal dengan platform merupakan keharusan dalam implementasi SDGs. Pada dasarnya SDGs dan MDGs memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama, hal tersebut karena SDGs melanjutkan tujuan utama dari MDGs yaitu perihal penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di dunia. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs memiliki beberapa perbedaan salah satu perbedaannya adalah MDGs hanya mempunyai 8 tujuan sedangkan SDGs memiliki 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDGs tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tujuan dari SDGs adalah sebagai berikut:

•Pilar Sosial

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

• Pilar Lingkungan

1. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
2. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
3. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
4. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
5. Melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosisten daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
6. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

• Pilar Ekonomi

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
3. Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara
4. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
5. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan.

• Pilar Hukum dan Tata Kelola

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Riau juga senantiasa harus siap mengikuti perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah dimulai dari Permendagri Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 hingga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah provinsi Riau sebagaimana yang disampaikan (Achilles A. Armenakis, dalam Shonhadji, 2012) yang menyampaikan bahwa kesiapan (readiness) adalah penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan dan titik kedewasaan yang berupa kesiagaan, kesiapan, kematangan untuk dapat menerima dan memperaktekan tingkah-laku tertentu.

Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti peleburan, istilah integrasi dapat diartikan sebagai pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinanhubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu. Istilah integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan sebagainya. Pengertian Integrasi Perencanaan Pembangunan mengacu pada Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis

Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab,2001:65). Sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang dimaksud dengan implementasi pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung, penalaahan dokumen, pencatatan serta melalui hasil wawancara langsung (deep interview) dengan informan terpilih. Untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat peneliti akan menetapkan beberapa kriteria tertentu terhadap informan penelitian. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Dengan teknik ini peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria informan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat/staf berkompeten yang menangani bidang perencanaan;
- b. Pejabat/staf yang pernah terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Riau
- c. Pernah/sedang terlibat dalam menangani penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Ditempatkan/bekerja pada bidang perencanaan sekurang-kurang terhitung tahun 2017.
- e. Pejabat struktural di OPD yang terkait dengan tugas pengentasan kemiskinan.
- f. Akademisi yang terlibat dalam penyusunan RAD SDGs (SDGs Center UNRI)

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan yaitu BAPPEDA Provinsi Riau dan instansi teknis yang berkaitan dengan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Perwakilan UNDP Indonesia yang ditempatkan di BAPPEDA Provinsi Riau untuk mengasistansi implementasi SDGs di Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian adalah tahun 2017 s/d 2019.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi Riau dalam agenda pencapaian pembangunan berkelanjutan global (SDGs) adalah dengan mengintegrasikan indikator SDGs kedalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Peran pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs adalah dengan membuat kebijakan, merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan yang mendukung terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan berkelanjutan. Indikator-indikator pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara langsung dan tidak langsung memiliki keterkaitan tujuan-tujuan SDGs. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengadopsi pola pembangunan global dan mengintegrasikannya kedalam dokumen rencana pembangunan daerah.

#### Proses Intergrasi dan Implementasi SDGs Dalam Pembangunan Khususnya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau

##### A. Penyusunan Indikator SDGs Provinsi Riau

Dari 241 Indikator SDGs Global yang dijadikan panduan dalam penyusunan SDGs nasional, dimana terdapat beberapa indikator SDGs Global tersebut yang diproksi dalam Indikator SDGs Nasional, demikian halnya dengan Indikator SDGs nasional terdapat beberapa indikator tersebut yang diproksi dalam Indikator SDGs Provinsi Riau, sehingga terjadinya beberapa penambahan indikator pada Pilar tertentu. Tetapi juga terdapat beberapa indikator SDGs Nasional yang tidak diakomodir dalam Indikator SDGs Provinsi Riau sehingga terjadi beberapa pengurangan indikator SDGs dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena indikator tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Riau dan pertimbangan lainnya karena ketidakterediaan data baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan 17 Tujuan,

94 Target dan 247 Indikator SDGs Provinsi Riau. Sedangkan khusus untuk indikator kemiskinan, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan sebanyak 26 indikator terkait kemiskinan yang menjadi acuan dalam program kegiatan serta pengukuran keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.

##### B. Pengintegrasian dan Penyelarasan Indikator SDGs Provinsi Riau

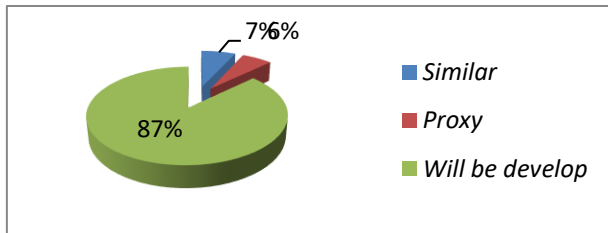
Tahap awal proses pengintegrasian SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan identifikasi terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pembangunan daerah provinsi Riau yaitu dokumen RPJMD 2014-2019. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian antara target dan indikator RPJMD dengan dokumen SDGs. Untuk melihat bagaimana keselarasan indikator TPB/SDGS dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 204-2019 maka kita dapat melakukan review keselarasan dengan menyandingkan tujuan-tujuan yang ada dalam RPJMD dengan tujuan tujuan yang ada pada SDGs.

Berdasarkan pada hasil review pemetaan terdapat kesesuaian antara indikator SDGs dan indikator revisi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 menunjukkan bahwa banyak sasaran dan indikator yang belum sama di antara keduanya. Walaupun demikian sudah ditemukan adanya kesamaan ataupun kemiripan antara indikator RPJMD dengan indikator SDGs, sesuai dengan pedoman dari Bappenas RI maka klasifikasi keselarasan indikator sebagai berikut:

- 1) Sama (Similar/Matched) yaitu indikator RPJMD yang sesuai dengan indikator SDG's, pada indikator similar/matched konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator SDG's.
- 2) Hampir sama atau (Proxy), yaitu indikator RPJMD dimana konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi atau komponen dalam menjawab indikator SDG's
- 3) Akan dikembangkan (Will be Develop) yaitu indikator SDG's yang belum dimiliki pemerintah provinsi dan belum ada proksinya karena metadata global belum tersedia.

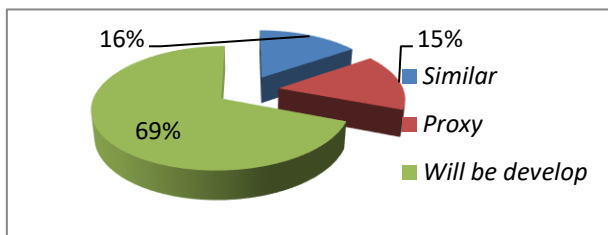
Mengacu kepada pedoman pengklasifikasian indikator diatas maka hasil dari review keselarasan indikator Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai

berikut; secara keseluruhan ada 17 atau sekitar (7%) indikator di dalam RPJMD Provinsi Riau yang selaras dengan indikator SDGs, dan terdapat sebanyak 15 indikator (6,02%) yang dapat diproxykan ke dalam indikator RPJMD, sedangkan 217 indikator belum ada di dalam RPJMD dan perlu dikembangkan (will be developed) di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya tentang analisis keselarasan indikator Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 1. Keselarasan Indikator SDGs dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019  
 Sumber: Sekretariat SDGs Provinsi Riau 2019, data diolah

Khusus untuk pengentasan kemiskinan pada Tujuan 1 SDGs Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun yang terdiri dari 26 indikator maka hasil keselarasannya adalah sebanyak 4 (empat) indikator atau sebanyak 15% yang selaras/sama dengan indikator RPJMD, 4 (empat) indikator atau sebanyak (15%) hampir sama (proxy), dan 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak (70%) yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau (will be develop), sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 2. Keselarasan Indikator Kemiskinan SDGs Dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019  
 Sumber: Sekretariat SDGs Provinsi Riau 2019, data diolah

### C. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka provinsi Riau memerlukan langkah-langkah konkret yang dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Aksi daerah (RAD). RAD akan

menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Dalam hal ini matrik RAD tidak hanya dibebankan kepada pemerintah melainkan termasuk non pemerintah, dimana nantinya rencana aksi daerah SDGs Provinsi Riau merupakan perwujudan dari kolaborasi dan pembagian peran pemerintah dan non pemerintah yang diwakili pihak swasta, lembaga organisasi sipil (LSM), pilantropi dan akademisi. Kemitraan antar pemangku kepentingan pembangunan di semua tingkatan dapat meningkatkan daya guna dan intergrasi pembangunan.



Gambar 3. Alur Proses Penyusunan RAD SDGs Provinsi Riau  
 Sumber :Bappeda Provinsi Riau, 2019.

Matriks RAD SDGs Provinsi Riau merupakan tahapan akhir dalam pengintegrasian SDGs dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian maka kedua dokumen tersebut melengkapi satu sama lainnya. Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis matriks yaitu matriks 1 yang berisi rangkuman indikator SDGs provinsi Riau dan penetapan target-target pencapaiannya, selanjutnya matriks 2 yang berisi penjabaran matriks 1 dengan memunculkan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan pada matriks 1. Dan matriks 3 merupakan penjabaran matriks 1 yang berisi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak non pemerintah.

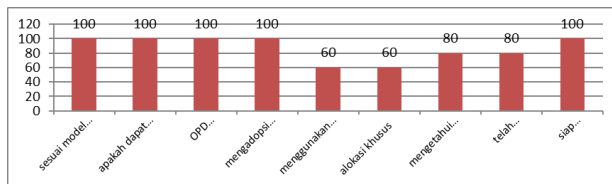
Khusus untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau dijabarkan didalam RAD SDGs provinsi Riau Tahun 2017-2019 tujuan 1 “Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun” melalui 19 program dan 60 kegiatan (terlampir) dengan total jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 60.947.943.700,- (Enam Pulu Milyar Sembilan Ratus Empat Pulu Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Pulu Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

### Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Integrasi dan Implementasi SDGs Khususnya Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau

Untuk melihat bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Riau dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan SDGs khususnya dalam pengentasan kemiskinan dimulai dengan melihat

bagaimana tanggapan para informan kunci khususnya terkait pemahaman, penerimaan, komitmen, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pengintegrasian maupun pengimplementasian SDGs. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 11 (sebelas) informan kunci menunjukkan bahwa hampir keseluruhan informan memahami SDGs dengan sangat baik, hanya 1 (satu) informan yang sekedar mengetahui.

Pemahaman terhadap SDGs tidak hanya pada lingkungan BAPPEDA Provinsi Riau saja, beberapa informan dari OPD terkait juga memahami SDGs dan prinsip-prinsipnya dengan baik. Dari berbagai wawancara yang dilakukan peneliti terhadap keseluruhan informan maka penulis mencoba melakukan pemetaan untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah provinsi Riau dalam pengintegrasian dan implementasi SDGs khususnya dalam pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 4 Pemetaan Persepsi Informan Terhadap Kesiapan Implementasi SDGs di Provinsi Riau  
Sumber : wawancara, data diolah

Hasil pemetaan diatas menggambarkan bahwa hampir semua informan memahami konsep SDGs dengan baik, mendukung dan menyatakan siap untuk mengimplementasikan SDGs di provinsi Riau, namun prosentase itu berkurang ketika ditanyakan pertanyaan yang sifatnya lebih implemtatif seperti “apakah sudah menggunakan indikator SDGs” ataupun “apakah ada alokasi khusus terkait SDGs”.

### **Analisis Kendala Integrasi dan Implementasi SDGs Khususnya Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengintergrasian SDGs dan implementasi SDGs, hal ini dapat dimaklumi karna setiap proses perubahan tentu saja menghadapi beberapa tantangan dan kendala. Salah satu kendala yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah pemahaman dan komitmen ASN terhadap SDGs. Persamaan persepsi terhadap SDGs merupakan hal penting yang harus dimiliki aparatur

perencana. Persepsi yang berbeda-beda akan menyebabkan lambatnya proses pengintegrasian atau bahkan mengamai kebuntuan, hal ini dimungkinkan karena SDGs masih dianggap sesuatu yang baru dan asing.

Komitmen pimpinan dalam implementasi SDGs juga menjadi hal krusial, pilihan untuk melaksanakan SDGs atau tidak, terkait dengan apakah isu SDGs telah menjadi isu utama (mainstreaming) dalam kebijakan pimpinan. Pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai isu dan amanat pembangunan yang harus dilaksanakan, keterbatasan sumber daya dan anggaran menjadikan pemerintah provinsi Riau harus lebih cermat melaksanakan program kegiatan sebagaimana juga dengan kebijakan pimpinan.

Selain pemahaman dan komitmen, kendala dalam integrasi dan implementasi SDGs adalah terkait dengan ketersediaan data pendukung capaian indikator dan perbedaan definisi dan cara perhitungan indikator SDGs, mengingat indikator SDGs telah menggunakan metadata yang jelas disertai dengan definisi, cara perhitungan dan disagregasi data, sementara sebahagian besar OPD masih menggunakan indikator yang datanya telah tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SDGs tahun 2017 yang dilakukan tim Sekretariat SDGs Provinsi Riau maka di dapatkan hasil dari 247 indikator SDGs Provinsi Riau hanya 30 indikator atau sebesar 12% yang dapat dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut menyebutkan bahwa 13 indikator mancapai target yang ditentukan, 7 indikator belum mencapai target tetapi capaian membaik dari tahun sebelumnya, 10 indikator memerlukan perhatian khusus karena capaiannya menurun/memburuk dari tahun lalu sedangkan sisanya sebanyak 217 indikator tidak dapat dievaluasi karena ketidakterediaan data pendukung.

Kendala lainnya adalah masih lemahnya kordinasi dan adanya hambatan terkait kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan SDGs memerlukan koordinasi yang baik antar OPD, stake holder dan pemerintah kabupaten/kota, karena pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau hanya dapat bertindak sesuai kewenangannya sementara banyak indikator-indikator SDGs yang pelaksananya adalah pemerintah kabupaten/kota. alam hal ini pihak pemerintah Provinsi Riau hanya menjalankan peran sebagai koordinator pembangunan daerah. Hal ini dapat kita contohkan untuk pencapaian indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi

Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat dan indikator 1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat, kedua indikator tersebut secara kewenangan dimiliki pemerintah kabupaten/kota dan juga pihak non pemerintah seperti yayasan pendidikan memiliki peran yang besar dalam peningkatan akses layanan pendidikan di daerah.

Masalah keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam implementasi SDGs, hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada periode 2014-2019 pemerintah Provinsi Riau mengalami defisit anggaran dan beberapa kali mengalami rasionalisasi anggaran. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah penghasil migas dan komoditas unggulan lainnya di Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan khususnya terkait transfer dana bagi hasil migas dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Riau dan hal ini tentunya sangat mempengaruhi kekuatan keuangan daerah dalam mencapai target pembangunan. Sementara pendapatan daerah dari pajak dan retribusi terkait komoditas unggulan juga mengalami penurunan akibat penurunan harga komoditas unggulan tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Proses Integrasi Dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Riau telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengintegrasian dan penyelarasan SDGs kedalam dokumen perencanaan tersebut dapat kita lihat dalam keselarasan antara keduanya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 17 indikator di dalam RPJMD Provinsi Riau yang selaras dengan indikator SDGs, dan sebanyak 15 indikator SDGs yang dapat diproyeksi ke dalam indikator RPJMD, sedangkan 217 indikator belum ada di dalam RPJMD dan perlu dikembangkan (will be developed).

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 pada tujuan 1 SDGs yang diimplementasikan kedalam 19 program dan 60 kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 60.947.943.700,-. Tujuan 1 SDGs ini menasar kepada 4 target dan 26 indikator kemiskinan SDGs dimana hasil review terhadap 26 indikator tersebut terdapat 4 (empat) indikator yang selaras/sama

dengan indikator RPJMD, 4 (empat) indikator hampir sama (proxy) dan 18 (delapan belas) indikator yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau (will be develop).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengintegrasian dan implementasi SDGs di Provinsi Riau antara lain; belum meratanya pemahaman dan komitmen ASN terhadap SDGs, ketersediaan data pendukung capaian indikator yang masih minim, perbedaan pemahaman, definisi dan cara perhitungan indikator-indikator SDGs, masih lemahnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak non pemerintah dan belum maksimalnya melibatkan non pemerintah dalam implementasi SDGs, serta defisit anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran untuk implementasi dan evaluasi SDGs..

#### 5. Daftar Pustaka

- Ansell C, Alison Gash, (2007) Collaborative Governance in Theory and Practice, University of California, Berkeley.
- Alkire, Sabina, et al.(2015). Multidimensional Poverty Measurement and Analysis, Oxford University Press: New York.
- Armenakis, A.A., Harris, S.G., and Mossholder, K.W. (1993). Creating Readiness for Organizational Change, *Human Relations*, 46 (June), 681-703
- Kuncoro, Mudrajad, (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta, Erlangga.
- Soalichin Abdul Wahab (2014), Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara.